

IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MELAWI

Via Octiwi

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

E-mail : viaasunarya@gmail.com

Abstrak

Penulisan Skripsi mengenai Implementasi Program Kartu Tanda Penduduk Elektronik (*e*-KTP) ini dimaksudkan agar memperoleh gambaran mengenai bagaimana proses pengimplementasian kebijakan yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terutama dalam pelaksanaan program *e*-KTP di Kabupaten Melawi. Judul skripsi ini di peroleh berdasarkan fenomena yang terjadi yakni mengenai pengimplementasian program *e*-KTP yang belum mencapai target yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah pemerintah yakni pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku pihak implementor dan masyarakat yang terlibat dalam implementasi kebijakan *e*-KTP ini. teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara, observasi serta dokumentasi. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pengimplementasian program *e*-KTP belum bisa mencapai target yang telah ditetapkan dikarenakan adanya beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya yakni faktor sumber daya yang meliputi sumber daya manusia dan sumber daya peralatan.

Kata Kunci : Kebijakan, Implementasi, Program, *E*-KTP.

Abstract

Essay writing on the implementation of the electronic population sign card program is intended to acquire an overview of how the process of policy implementation done recording service and civilian population, especially in the implementation of the *e*-KTP program in the Melawi regency. title of this essay is obtained based on the phenomenon that is happening on the implementation of *e*-KTP program that has not reached a predetermined target. In this study researchers used primarily to descriptive research using qualitative methods. subjects in this study is that the official government population and civil registration as the implementor and the people involved in the implementation of this policy of the *e*-ktp card. data collection techniques used were interview, observation and documentation. Conclusion of this research is the implementation of *e*-ktp card program has not been able to achieve the set targets due to several factors which is the bottleneck in the implementation of resource factors that include human resources and equipment resources.

Keywords: Policy, Implementation, Program, *E*-KTP Card.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Kartu tanda penduduk elektronik (*e-KTP*) merupakan salah satu wujud dari penerapan *e-government* yang sedang berkembang di Indonesia. Implementasi Program *e-KTP* ini direalisasikan berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa penduduk hanya diperbolehkan memiliki satu KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). Penerapan *e-KTP* juga telah di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan dan Perpres Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. Sementara itu implementasi program *e-KTP* di Kabupaten Melawi telah di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan data yang dikutip dari <http://pontianak.tribunnews.com> Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi tidak bisa mencapai target perekaman *e-KTP* 100 persen hingga akhir tahun 2012 Dari 137 116 warga wajib *e-KTP* di wilayah tersebut, baru 65 persen warga yang melakukan rekam *e-KTP*. Masih ada sekitar 35 persen warga yang belum melakukan perekaman data. Sementara itu berdasarkan hasil *pre survey* peneliti melihat bahwa dalam kegiatan perekaman data masih di temukan masalah yang mengakibatkan terhambatnya perekaman data baik dari segi aparat, masyarakat maupun peralatan yang digunakan dalam perekaman data *e-KTP* .

Berdasarkan data yang diperoleh mengindikasikan bahwa pengimplementasian

program *e-KTP* belum maksimal terutama dalam pencapaian target. Dengan adanya permasalahan ini kiranya perlu dilakukan penelitian dengan judul Implementasi Program Kartu Tanda Penduduk Elektronik (*e-KTP*) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi.

2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan permasalahan yang tertuang dalam fokus penelitian maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu : Mengapa implementasi program *e-KTP* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi belum berhasil secara maksimal ?

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan daripada penelitian ini adalah :

1. Mengungkapkan bagaimana proses implementasi program *e-KTP* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi.
2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan implementasi program *e-KTP* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi belum berhasil secara maksimal.

2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi khazanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu pemerintahan sehingga dapat membantu memperkaya konsep serta teori dalam mempelajari ilmu pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan kontribusi bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi dalam pelaksanaan implementasi program *e-KTP*.

B. TEORI DAN METODOLOGI

1. Teori

KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan / pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. *United Nation* dalam Wahab (2012:9) menyatakan bahwa kebijakan adalah pedoman untuk bertindak, pedoman itu bisa saja amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, publik atau privat, kebijakn dalam maknanya seperti itu mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana. Sementara itu Carl Friedrich dalam Wahab (2012:9) menyatakan bahwa kebijakan itu ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusul *an oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Kebijakan publik merupakan fenomena yang sudah terbiasa terdengar dikalangan masyarakat tak jarang kalangan akademisi dan kalangan professional menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu sesuatu yang abstrak, tidak jelas – sosoknya, kabur, tidak berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari dan lain sebagainya (Wahab,2012:1). Kebijakan publik memang selalu mewarnai proses kehidupan masyarakat sehingga masyarakat sebagai bagian dari warga sistem politik yang ada di dunia akan selalu terbawa kedalam pengaruh kebijakan publik. Adapun definisi kebijakan publik menurut Thomas Dye

mengandung makna bahwa kebijakn publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah bukan organisasi swasta, kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah. Sementara itu James E. Anderson (1979:3) dalam Subarsono (2005:2) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah

Nugroho (2011:158) mengemukakan bahwa ada empat kegiatan pokok yang berkenaan dengan kebijakan publik, yaitu :

1. Perumusan masalah
2. Implementasi kebijakan
3. Evaluasi kebijakan
4. Revisi kebijakan, yang merupakan perumusan kembali dari kebijakan.

Dalam suatu kebijak n publik implementasi kebijakan merupakan tahapan yang paling penting. Kebijakan yang telah ditetapkan harus segera diimplementasikan agar kebijakan tersebut dapat bermanfaat dan mempunyai tujuan yang jelas. Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2012:148) menyatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan ya g memberikan otoritas program,, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Subarsono (2005:87) men atakan ada banyak variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik ang bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari program melibatkan upaya-upaya *policy makers* untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran. Wahab (2012:1250) menyatakan bahwa realita saat ini menunjukkan, implementasi kebijakan itu sejak awal melibatkan sebuah proses rasional dan emosional yang teramat kompleks sehingga pada akhirnya implementasi suatu kebijakan akan memasuki ranah

permasalahan yang konflik, keputusan-keputusan yang pelik dan isu-isu kebijakan lainnya. Berkembangnya pengetahuan mengenai kebijakan publik membuat banyak ahli kebijakan membuat suatu model pengimplementasian kebijakan antara lain model implementasi kebijakan yang diperkenalkan oleh Edwards terdapat empat variabel yang mempengaruhi kebijakan publik yaitu sebagai berikut (Tangkilisan,2003:12-13):

1. Komunikasi. Agar implementasi menjadi efektif maka mereka yang tanggungjawabnya adalah untuk mengimplementasikan sebuah keputusan mesti tahu apa yang seharusnya mereka kerjakan.
2. Sumberdaya. Tidak menjadi soal betapa jelas dan konsisten komando implementasi ini dan tidak menjadi soal betapa akuratnya komando ditransmisikan jika personalia yang bertanggungjawab dalam melaksanakan semua kebijakan kurang sumberdaya untuk melakukan sebuah pekerjaan efektif, implementasi tidak akan efektif pula.
3. Disposisi atau sikap dari implementor adalah faktor kritis ketiga di dalam pendekatan terhadap studi implementasi kebijakan publik. Cara dimana implementor ini melakukan seleksinya, bagaimanapun juga bergantung sebagian besar pada disposisinya terhadap kebijakan.
4. Struktur Birokrasi. Jika sumberdaya yang cukup untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan ini ada dan para implementor tahu apa yang harus dikerjakan dan ingin mengerjakannya, implementasi mungkin masih dicegah karena kekurangan dalam struktur birokrasi. Sebagaimana unit-unit organisasional menyelenggarakan kebijakan dengan *standard operating procedure* (SOP).

2. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul penelitian yakni implementasi program *e-KTP* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, maka penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan teknik analisis kualitatif digunakan dengan maksud untuk memahami lebih mendalam mengenai faktor yang mempengaruhi implementasi pada pelaksanaan program *e-KTP* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi.

b. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini yaitu beberapa pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, namun dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive* sebagai teknik penentuan informan. Teknik *purposive* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono,2011:85). Berdasarkan teknik *purposive* maka subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, Sekretaris, Kepala Bidang Kependudukan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, Kepala Bidang Informasi dan Evaluasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, staf pada Bidang Kependudukan serta perwakilan masyarakat.

Objek dalam penelitian ini yaitu mengenai implementasi program *e-KTP* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi.

c. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik analisis model Miles and Huberman. Teknik analisis data model Miles and Huberman yaitu sebagai berikut :

1. *Data Reduction* (reduksi data)

Reduksi data merupakan salah satu teknik analisis data, Sugiyono (2011 :247) mengemukakan bahwa mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting serta dicari tema dan polanya.

2. *Data Display* (penyajian data)

Penyajian data merupakan proses lebih lanjut setelah proses reduksi data, menurut Sugiyono (2011:2490) dalam penelitian kualitatif penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

3. *Conclusion Drawing* / verification

Langkah terakhir dalam teknik analisis data menurut Miles and Huberman yaitu *conclusion Drawing / Verification*. Sugiyono (2011:252) menyatakan bahwa kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang dapat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya..

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa model kebijakan yang diungkapkan oleh Edward III sangat berpengaruh dalam pengimplementasian program *e-KTP* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi.

1. Komunikasi

Komunikasi yang diterapkan dalam pengimplementasian *e-KTP* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah cukup baik, baik itu mengenai transmisi, konsistensi dan kejelasannya. Salah satu langkah komunikasi yang dilakukan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi yaitu dengan melakukan

sosialisasi dan memberikan edaran kepada masyarakat mengenai penerapan kebijakan program *e-KTP*. Sosialisasi ini diberikan dengan maksud agar masyarakat memahami tentang program seperti apa *e-KTP* itu apa saja manfaat yang dapat diperoleh dengan di berlakukannya kebijakan tersebut. Sosialisasi ini diharapkan dapat membantu pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyebarkan informasi mengenai kebijakan *e-KTP*.

Menurut Edward III dalam (Winarno, 2012:178), bahwa persyaratan pertama bagi implementasi yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Pihak Disdukcapil sudah sangat optimal dalam menerapkan komunikasi kepada masyarakat maupun kepada aparatur yang terlibat dalam pengimplementasian kebijakan mengenai pelaksanaan *e-KTP*. Seperti yang disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi pada tanggal 27 Mei 2013 "kami sudah melakukan sosialisasi ke 11 kecamatan tentang *e-KTP* sejak akhir 2011, selain itu kami juga sudah menyampaikan informasi melalui radio lokal dan surat edaran". Pernyataan tersebut menegaskan bahwa dalam hal komunikasi kepada masyarakat pihak Disdukcapil sudah melakukan secara optimal dan berkelanjutan. Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Bidang Kependudukan pada tanggal 28 Mei 2013 yang menyatakan bahwa : " sebenarnya 2011 sampai 2012 sudah kita beri informasi cuma kan kita berjenjang jadi yang kita undang kan hanya Kepala Desa dan Sekretaris Desa karena ini yang merupakan ujung tombak kita di lapangan, jadi harapan kita mereka yang bagaimana menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya barang ini". Berdasarkan pernyataan dari beberapa informan sangat jelas bahwa dalam pengimplementasian program *e-KTP* yang dilaksanakan di Kabupaten Melawi komunikasi telah

dilakukan secara optimal baik itu komunikasi kepada masyarakat maupun komunikasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada pihak kecamatan yang merupakan perpanjangan tangan dari pihak dinas.

Selain komunikasi secara eksternal pihak Capil juga telah melaksanakan komunikasi secara internal baik itu dari pimpinan kepada bawahan, sesama aparatur dan dari pihak capil kepada pihak kecamatan hingga desa mengenai pengimplementasian program e-KTP ini. Kepala Dinas telah berupaya diperlukan guna mengerahkan aparatur dan bidang yang terkait dengan pelaksanaan program e-KTP ini. Seperti yang diungkapkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi yang menyatakan bahwa “ dalam pelaksanaan e-KTP ini kami sudah mengerahkan masing-masing bidang yang berkaitan dengan program ini untuk dapat melaksanakan program ini dengan baik dan benar sehingga tidak terjadi kendala yang menyulitkan”. Dari pernyataan tersebut di per leh fakta bahwa pihak Capil telah melakukan komunikasi yang cukup baik mulai dari komunikasi sesama pihak implementor sampai pada komunikasi kepada masyarakat. Berkaitan dengan komunikasi antar instansi mengenai program e-KTP pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah memberikan informasi dalam bentuk edaran kepada setiap Instansi Pemerintahan ma pun Bank untuk menggunakan e-KTP karena pada tanggal 31 Desember 2013 dalam pelayanan apapun masyarakat tidak akan dilayani apabila menggunakan KTP lama . Seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menyatakan bahwa “ kami sudah memberikan edaran agar setiap instansi menyiapkan *card rider* agar pelayanan bisa menggunakan e-KTP”. Sampai saat ini pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetap secara berkelanjutan memberikan informasi kepada

masyarakat untuk segera melakukan perekaman e-KTP.

2. Sumber Daya

Sumber daya manusia sangat dibutuhkan dalam pengimplementasian kebijakan, namun sumber daya yang dibutuhkan juga harus merupakan sumber daya yang benar-benar berkualitas yang mampu memberikan kontribusi yang baik bagi sebuah kebijakan publik. Selain sumber daya manusia, sumber daya yang berupa peralatan juga sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi peneliti melihat bahwa ketersediaan sumber daya dalam pengimplementasian kebijakan e-KTP masih menjadi kendala yang cukup sulit, baik itu dari segi kualitas manusia maupun peralatannya. Untuk menunjang terlaksananya implementasi kebijakan diperlukan sumber daya manusia yang baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Dari segi kualitas maka semestinya mengenai tugas dan kewajibannya dalam pengimplementasian program e-KTP ini, selain itu implementor juga harus dapat memberikan strategi khusus untuk mengahapi kendala yang mungkin terjadi dalam proses pengimplementasian kebijakan. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti menemukan fakta bahwa dalam perekaman data e-KTP pihak capil harus melakukan perekaman melebihi jam kerja yang ada, perekaman data e-KTP terkadang dilakukan sampai malam hari mengingat minimnya tenaga aparatur yang ada, seperti yang di sampaikan oleh Staff pada Bidang Informasi dan Evaluasi yang menyatakan bahwa “ jumlah operator yang sedikit mengharuskan untuk lembur sampai malam hari, karena banyak masyarakat yang mau melakukan perekaman data “. hal ini yang terkadang menjadi

penghambat dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Sumber daya peralatan dalam hal ini berkaitan dengan peralatan yang digunakan dalam pengimplementasian *e-KTP* dirasakan masih kurang. Saat ini pihak Capil baru memiliki 2 unit alat perekaman khusus untuk perekaman yang dilakukan di Capil, 2 unit alat ini dirasakan masih belum cukup untuk melayani masyarakat dengan jumlah yang banyak. Selain itu dilihat dari segi kualitasnya alat yang ada memiliki kualitas yang kurang baik karena sering sekali mengalami kerusakan yang menghambat proses perekaman *e-KTP*, sangat jelas bahwa faktor sumber daya dalam pengimplementasian program *e-KTP* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi masih menjadi kendala dalam pencapaian tersebut jelas bahwa tidak ada kendala dalam tataran target terutama mengenai sumber daya manusia dan peralatan.

3. Disposisi

Menurut Edward III (dalam Widodo, 2008:104) menyatakan bahwa “jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (*implementators*) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan itu, tetapi mereka harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut”. Oleh karena itu dalam pelaksanaan program *e-KTP* kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut harus benar-benar ada, apabila tidak adanya rasa kemauan yang tinggi maka hanya akan merusak kebijakan program tersebut dan tidak membuahkan hasil yang baik. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti bahwa disposisi dalam pengimplementasian *e-KTP* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi sudah cukup baik. Aparatur telah menunjukkan sikap jujur dan komitmen yang tinggi dalam pengimplementasian kebijakan, hal ini terlihat

dari sikap ketika memberikan pelayanan ketika akan melaksanakan perekaman *e-KTP*. Selain itu terlihat dari tidak adanya sikap nepotisme ketika memberikan pelayanan dimana aparaturnya berusaha untuk bertindak adil dan membiasakan budaya antri bagi masyarakat yang akan melakukan perekaman. Aparatur juga memberikan pelayanan yang cukup maksimal yaitu Selama hari kerja serta berupaya bekerja dengan rasa ikhlas tanpa meminta biaya dari masyarakat meskipun terkadang ada beberapa aparaturnya yang terkesan kurang ramah. Hal senada juga diungkapkan oleh salah seorang masyarakat yang melakukan perekaman di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menyatakan bahwa “Pelayanan dalam pembuatan *e-KTP* sudah bagus”. Dari pernyataan informan tersebut jelas bahwa tidak ada kendala dalam tataran disposisi yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi.

4. Struktur Birokrasi

Menurut Edward III (dalam Widodo, 2008:106) menyatakan bahwa struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya. Dalam pengimplementasian program *e-KTP* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terlaksananya implementasi adalah struktur birokrasi. Pada dasarnya pelaksanaan suatu kebijakan bisa saja terhalang oleh struktur-struktur organisasi yang ada. Menurut Edwards (dalam Winarno, 2006:2012) ada dua karakteristik utama dari birokrasi, yakni prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau sering disebut sebagai *Standard Operating Procedures (SOP)* dan Fragmentasi.

Berdasarkan hasil dokumentasi sangat jelas bahwa pembagian tugas dan kewenangan mengenai

pengimplementasian program *e-KTP* bagi organisasi telah di atur dalam Peraturan Bupati Melawi Nomor 39 Tahun 2001 Tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi. Program *e-KTP* ini di laksanakan oleh Bidang Kependudukan dan Bidang Informasi dan Evaluasi. Dimana telah terjadi pembagian wewenang dan tugas bagi tiap apapun Bidang. Berdasarkan hasil wawancara dapat di simpulkan bahwa instansi yang melaksanakan program *e-KTP* ini yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pihak Kecamatan. Koordinasi sering dilakukan oleh pihak Dinas dan kecamatan karena dalam perekaman pihak dinas melakukan perekaman secara *offline* sementara pihak kecamatan secara *online*.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam pembagian tugas pihak implementor sudah melaksanakannya dengan baik, hal ini di pertegas dengan pernyataan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi yang menyatakan bahwa “ pembagian tugas sudah kami laksanakan dengan baik “. Berdasarkan hasil observasi peneliti melihat bahwa mengenai SOP pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah memiliki SOP yang sangat baik mengenai prosedur pembuatan *e-KTP*.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Komunikasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan berbagai upaya komunikasi kepada masyarakat dengan melakukan berbagai kegiatan antara lain melakukan sosialisasi ke 11 kecamatan yang sudah dimulai sejak akhir tahun 2011,

memberikan edaran, sosialisasi melalui radio lokal, serta pemasangan spanduk.

Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus berupaya memberikan informasi kepada masyarakat tentang penting dan wajibnya program *e-KTP* sehingga masyarakat bisa dengan segera melakukan perekaman. Komunikasi dalam bentuk sudah dilakukan pihak implementor dengan tujuan agar Kabupaten Melawi dapat segera mencapai target perekaman yang telah ditetapkan.

2. Sumber Daya

Dalam pengimplementasian kebijakan program *e-KTP* ini sumber daya sangat di butuhkan baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil telah mengetahui apa saja yang menjadi tanggung jawab mereka dalam pengimplementasian *e-KTP* hanya saja dalam pelaksanaannya masih terkendala dengan terbatasnya sumber daya yang dimiliki seperti pengetahuan yang masih rendah dari aparatur. Jumlah operator dalam perekaman *e-KTP* masih kurang sehingga terkadang menghambat perekaman apabila masyarakat ramai dalam melakukan perekaman.

Sumber daya peralatan juga menjadi kendala bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pengimplementasian *e-KTP*. Peralatan sering mengalami kerusakan yang membutuhkan waktu lama dalam proses perbaikannya, dimana pihak capil hanya memiliki peralatan yang terbatas untuk melakukan perekaman data *e-KTP* kerusakan pada peralatan ini yang menyebabkan perekaman menjadi terkendala.

3. Disposisi

Aparatur dalam pelaksanaan program *e-KTP* sudah melaksanakan pekerjaannya dengan cukup baik, aparatur berupaya untuk melayani dengan tulus agar masyarakat bisa merasa dihargai dan tidak memberikan komentar yang negatif kepada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelaksanaan *e-KTP*.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam pengimplementasian program *e-KTP* sudah cukup baik, pihak Capil telah melakukan pembagian-pembagian tugas dan kewenangan dengan jelas antar bidang dalam pengimplementasian program *e-KTP* ini. *Standard Operating Procedures* (SOP) juga sudah dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sehingga dalam pengimplementasian program *e-KTP* masyarakat bisa dengan mudah mengetahui persyaratan dan prosedur dalam pembuatannya.

Berdasarkan analisis empat faktor tersebut di atas, bahwa faktor yang menjadi kendala dalam pencapaian target implementasi program *e-KTP* adalah faktor sumber daya yakni mengenai sumber daya manusia dan sumber daya peralatan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi.

2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa saran agar pengimplementasian program *e-KTP* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi bisa mencapai target yang lebih baik :

1. Faktor sumber daya sangat berperan penting untuk itu perlu adanya perhatian khusus dari pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk lebih meningkatkan pemahaman dan pengetahuan aparatur dalam pengimplementasian program *e-KTP* melalui kegiatan-kegiatan bimtek dan kegiatan lainnya
2. Sumber daya peralatan juga harus lebih diperhatikan, pihak Capil harus benar-benar memperhatikan kesiapan peralatan dan apabila terjadi kerusakan harus segera melakukan perbaikan agar tidak menghambat ketika

melakukan perekaman serta berupaya meminimalisir terjadinya kerusakan pada peralatan rekam data *e-KTP*.

3. Dalam penggunaan alat aparatur harus lebih peka berhati-hati dan harus menimbulkan rasa memiliki yang tinggi terhadap peralatan.
4. Perlu adanya pemahaman lebih mendalam lagi bagi setiap aparatur mengenai pembagian kewenangan yang diberikan sehingga aparatur bisa menguasai tugas yang diberikan kepadanya. Selain itu *Standard Operating Procedures* (SOP) yang sudah ada juga harus lebih di taati bukan hanya dari masyarakat saja tetapi pihak implementor juga harus mentaati SOP yang sudah ada.
5. Perlu adanya rekomendasi dari pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi kepada Badan Kepegawaian Daerah setempat untuk memba tu dalam mengatasi persoalan kekurangan tenaga khususnya dalam pengimplementasian program *e-KTP* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi.

3. Keterbatasan Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian peneliti telah berupaya semaksimal mungkin agar penelitian ini bisa menjadi penelitian yang bermanfaat kedepannya bagi siapa saja yang membutuhkan. Dalam penelitian ini peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam melakukan analisis data, dimana peneliti merasakan banyaknya keterbatasan yakni mengenai minimnya waktu yang dimiliki setiap informan sehingga sulit bagi peneliti untuk bertemu serta masih minimnya kemampuan peneliti dalam melakukan analisis data secara tuntas. Selain itu apabila terdapat keterbatasan dalam hal hasil wawancara, observasi dan dokumentasi maka peneliti berharap agar pembaca memaklumi.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Hj. Hardilina, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dr. H. Wijaya Kusuma, MA, Selaku Ketua Pengelola Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Drs. Sugito, M.Si, Selaku Pembimbing Utama dan Drs. Asmadi, M.Si, selaku pembimbing pendamping yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga serta telah berkenan memberikan ilmu dan bimbingan selama proses penulisan Skripsi ini.
4. Drs. Sukamto, M.Si, Selaku Penguji Pertama dan Ibu Antonia Sasap Abao, M.Si, Selaku Penguji Pendamping yang telah memberikan banyak masukan dan saran selama proses penyelesaian Skripsi.
5. Pemerintah Kabupaten Melawi, melalui Badan Kepegawaian Daerah yang sudah memberikan dukungan dalam bentuk moril maupun materiil selama menempuh pendidikan di Program Studi Ilmu Pemerintahan.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi yang terlibat secara langsung dalam penyusunan Skripsi ini, terima kasih atas kerjasama dan kemudahan yang diberikan selama proses penyusunan skripsi.
7. Civitas Akademika Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah membantu dalam proses penyelesaian Skripsi ini khususnya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk abang terbaik kami bang Mochtar.

8. Orang Tua dan keluarga serta Seluruh teman-teman Wasana Praja angkatan 2009 yang sangat saya sayangi terimakasih atas persahabatan dan persaudaraan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Dwiyanto, Agus.2010. *Manajemen Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nugroho, Riant.2011. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S.2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset.
- Wahab, Solichin Abdul.2011. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Widodo, Joko.2008. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang : Bayumedia.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik : Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS

Dokumen Resmi :

Peraturan daerah Kabupaten Melawi Nomor 4 Tahun
2011 Tentang Administrasi
Kependudukan.

Peraturan Bupati Melawi Nomor 39 Tahun 2011
Tentang Struktur Organisasi, Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Melawi.

Dokumen :

Data Rekapitulasi Perekaman *e*-KTP Kabupaten
Melawi Tahun 2013.

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi
Periode 2011-2015.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai civitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : VIA OCTIWI
NIM / Periode lulus : E42009058/ 2013
Fakultas / Jurusan : FISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address/HP : vtaaswanarya@gmail.com / 081253280606

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1),
menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program
Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas
Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
(EKTP) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MELAWI

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini,
Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk
pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet
atau media lain :

- fulltext
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama
saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

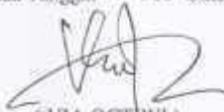
Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala
bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal Prodi IP 10/2013
2

H. Wijaya Kusuma, MA, Ph.D
NIP. 196202141986031001

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 10 Oktober 2013


(VIA OCTIWI)